

Kekuasaan, Pengetahuan, dan Hegemoni Bahasa dalam Perspektif Michele Foucault dan Francis Bacon

Refaldi Andika Pratama¹

¹ Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia
E-mail: refaldi.andika.1807316@students.um.ac.id¹

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai pemikiran yang diajukan oleh dua tokoh filsuf yang berbeda, yakni Foucault tentang kekuasaannya dan juga Bacon tentang kuasa pengetahuannya. Menggabungkan pemikiran kedua tokoh filsuf tersebut dapat ditarik korelasi antara bagaimana sebuah kuasa mampu mendefinisikan ilmu pengetahuan dan juga bagaimana ilmu pengetahuan mendatangkan kekuasaan. Artikel ini ditulis dengan studi kepustakaan dan berfokus pada bagaimana pemikiran ala dua tokoh tersebut dapat terbentuk dan bagaimana wujudnya serta dengan contoh kasus pada bidang pendidikan khususnya sejarah dan juga ilmu kebahasaan. Mempelajari filsafat dapat merumuskan bagaimana kekuasaan dan ilmu pengetahuan dapat dikaji begitu pula dengan artikel ini yang berusaha untuk mengkaji antara ilmu pengetahuan, bahasa, dan bagaimana sebuah kuasa mengekang kedua hal tersebut. Pendidikan merupakan hal universal, namun hal tersebut tidak dapat dicapai tanpa adanya kekuasaan, begitu pula dengan pengetahuan.

Kata Kunci: relasi kuasa; filsafat sejarah; filsafat bahasa.

Abstract

This article discusses about the concepts by the two different philosophers, which are Foucault about his power relation and Bacon about his power of knowledge. Exploring the thoughts of the two philosophers, a correlation can be drawn between how a power can define the science thus personal knowledge and how science brings off the power. This article written using library research methods and focuses on how the two figures' concepts can be formed and how it formed as well as with case of education, especially in history education and the linguistics. By studying philosophy, it is able to examine between how power and science can be studied as well as this article is to seeks the relations between science, language, and how a power restrains those two things. Education is universal, but these two things can't be reach without a power and vice versa.

Keyword: knowledge/power; history philosophy; linguistics philosophy.

1. Pendahuluan

Filsafat hadir di setiap sendi kehidupan manusia. Filsafat hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia yang tidak dapat di jawab oleh bidang ilmu yang lain. Bahkan, menurut para filsuf, setiap ilmu dimulai dengan filsafat dan diakhiri dengan seni (Suriasumantri, 2009). Artinya, semua ilmu, baik itu ilmu alam atau ilmu sosial sebelum melakukan perkembangan bermula dari filsafat. Bahkan, metode normatif dan deduktif dalam ilmu pengetahuan tercipta berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam filsafat.

Sebagai induk dari ilmu pengetahuan, filsafat mempertanyakan ilmu-ilmu pengetahuan berdasarkan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis (Suriasumantri, 2009). Ketiganya menjadi landasan bagi ilmu pengetahuan. *Pertama*, ontologis memiliki pertanyaan 'apa yang dikaji?'. *Kedua*, epistemologis memiliki pertanyaan 'bagaimana caranya untuk mendapatkan pengetahuan tersebut?'. *Ketiga*, aksiologis memiliki pertanyaan 'untuk apa pengetahuan tersebut digunakan?'. Ketiga hal ini digunakan untuk mengenali ilmu pengetahuan itu sendiri.

Para pemikir atau filsuf memiliki cara pandang sendiri mengenai ilmu-ilmu yang terkandung dalam filsafat. Salah satunya adalah Foucault. Foucault memiliki nama asli Michel Foucault. Ia merupakan filsuf asal Perancis yang lahir pada tahun 1926. Foucault merupakan murid dari Jean Hyppolite dan Louis Althusser. Sebelum menerbitkan buku yang berjudul *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason* ia merupakan seorang diplomat luar negeri sehingga jelas bagaimana pemikirannya dapat terbentuk dan dapat dipahami oleh banyak orang.

Foucault merupakan tokoh sayap kiri pada masanya. Dirinya sangat aktif dalam sejumlah kelompok sayap kiri yang terlibat dalam kampanye anti-rasisme, gerakan pelanggaran anti-Hak Asasi Manusia, dan perjuangan untuk reformasi pemsyarakatan. Pemikiran Foucault memiliki pengaruh yang luas terhadap berbagai kajian ilmu, khususnya pada ilmu-ilmu sosial seperti antropologi maupun sosiologi termasuk pula bagaimana kita dapat memandang sejarah sebagai ilmu secara tidak langung. Sebagai seorang filsuf, tentunya banyak karya dan teori yang lahir dari buah pemikiran seorang Foucault. Teori-teori inilah yang digunakan sebagai pedoman di dalam ilmu pengetahuan.

Teori-teori dan konsep-konsep yang dilahirkan oleh Foucault membahas hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, serta bagaimana mereka digunakan untuk membentuk kontrol sosial melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan, terlebih di penjara dan rumah sakit. Karya-karya Foucault menunjukkan bahwa persoalan kekuasaan telah menjadi pokok perhatiannya sepanjang karir intelektualnya. Foucault fokus dalam membahas kekuasaan serta hubungannya dengan pengetahuan secara eksplisit. Konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian atau Weberian.

Pemikiran Foucault mengenai kekuasaan lebih banyak dipengaruhi oleh Nietzsche. Namun, sering juga Foucault tidak sependapat dengan Nietzsche. Bagi Foucault, kekuasaan digunakan untuk mengatur rakyatnya. Bahkan, ia memiliki pemikiran bahwa kehidupan seksual ia pelajari dari kebijakan Ratu Victoria I yang begitu dominan dalam mengatur rakyatnya. Termasuk masalah seksualitas yang merupakan sebuah hal yang *personal* dan privat (bersifat pribadi). Menurutnya, kehidupan seksualitas yang bebas harus dipisahkan dari kesopanan. Di sini lah, tampak bahwa kekuasaan yang diartikan oleh Foucault harus dibatasi oleh sistem pemerintahan negara.

Pemikiran Foucault mengenai kekuasaan menjadi menarik untuk dibahas, karena jika dilihat latar belakang dan teori-teori buah pemikirannya, Foucault menjadi sangat menarik. Karena, Foucault sendiri lahir dari keluarga filsuf namun fokus kajiannya terletak pada ilmu-ilmu sosial atau humanisme. Kecondongannya pada ilmu-ilmu sosial ini merupakan hasil berguru dengan beberapa ahli terdahulu. Buah pemikirannya ini menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang dipelajari hingga kini.

Selain Foucault, terdapat seorang filsuf yang juga fokus pada kajian mengenai kekuasaan. Dirinya adalah Francis Bacon seorang filsuf asal Inggris. Bacon sendiri lahir jauh sebelum Foucault lahir, yaitu pada tahun 1561. Latar belakang Bacon cukup baik, yaitu putra dari seorang pegawai eselon tinggi pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth. Menurut Bacon, tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk penguasaan manusia terhadap alam. Ilmu pengetahuan perlu mempunyai kegunaan praktis dan menambah superioritas manusia terhadap alam semesta. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, manusia akan dapat menundukkan alam. Karena itu, Bacon memiliki pedoman '*knowledge is power*' seperti yang sering digaungkan oleh Plato.

Teori yang dihasilkan Francis Bacon merupakan buah pemikiran yang dilaluinya semasa menjadi politisi. Bagi Bacon, ilmu pengetahuan dan ilmuwan terlalu berupaya untuk mengontrol dan memanipulasi alam menurut kehendaknya. Hal inilah yang menjadi kritik Bacon. Menurutnya, kekuasaan sebenarnya ada pada ilmu pengetahuan. Gagasan ini yang membuat Bacon dapat dikatakan sebagai pencetus dasar lahirnya paham empirisme, juga sebagai ahli pertama yang menyatakan bahwa pengalaman sebagai sumber kebenaran yang paling dipercaya (Zubaedi, 2007). Kemudian gagasan mengenai paham empirisme ini dikembangkan dan disempurnakan oleh filsuf atau ahli setelahnya, seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan George Berkeley. Berdasar dari pemikiran kedua tokoh ini, maka pendidikan tidaklah *se-universal* itu, diperlukan kekuasaan (*privileged*) untuk mencapainya.

2. Metode

Untuk membantu dalam pencarian data, *paper* ini dibuat dengan metode *library research* atau studi pustaka. Metode studi kepustakaan adalah studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai material yang ada di perpustakaan. Misalnya, dokumen, buku, majalah dan lain sebagainya (Mardalis, 1999). Metode ini dipilih karena tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian studi lapangan dan menanyakan secara langsung pada para pemikir, dalam hal ini Foucault dan Bacon.

Agar lebih komprehensif, penting untuk membahas kedua filsuf yang memiliki andil besar dalam ilmu pengetahuan. Keduanya, sama-sama membahas mengenai kekuasaan namun, dengan sudut pandang berlainan. Maka dari hal itu, menjadi menarik untuk membahas lebih dalam kedua filsuf yang memiliki cara pandang berbeda mengenai “kekuasaan” dalam ilmu pengetahuan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pemikiran Filsafat Michel Foucault

Michel Foucault (1926-1984) merupakan seorang pemikir dan juga seorang cendekiawan Prancis terkemuka abad ke-20, dirinya memiliki kekayaan akan pengetahuan yang luas serta memberikan perhatian khusus dalam berbagai disiplin dan ilmu pengetahuan (Kebung, 2017). Foucault lahir di Poitiers, Prancis pada tahun 1926, dirinya hidup dalam sebuah keluarga yang menganut agama Katolik yang sangat taat di mana ayahnya merupakan seorang dokter ahli bedah (Af, 2012). Karena pekerjaan ayahnya yang seorang dokter ahli bedah, maka keluarganya mengharapkan agar Foucault dapat meneruskan pekerjaan ayahnya. Justru sejak kecil Foucault lebih tertarik pada bidang kesejarahan yang dikemudian hari berkembang pada filsafat (Adlin, 2016).

Foucault lebih dikenal sebagai salah satu orang pemikir post-modernis bersama sejumlah rekannya yang lain seperti Gilles Deleuze, François Lyotard, Jacques Derrida, dan masih banyak yang lainnya (Kebung, 2017). Jika dilihat dari berbagai karyanya, Foucault banyak mencoba menelusuri dan membedah perubahan epistemologis di berbagai bidang keilmuan, dia mengajukan berbagai konsep seperti kuasa/pengetahuan, episteme, genealogi dan arkeologi, dan konsep-konsep lainnya, serta pandangan bahwa kebenaran itu adalah rezim (Adlin, 2016). Berbagai pemikirannya masih terus digunakan dan dipelajari sampai sekarang. Pemikirannya masih relevan digunakan untuk memahami fakta sosial dan perkembangan budaya kontemporer. Walaupun demikian, pemikirannya pun masih menjadi perdebatan sampai sekarang ini. Namun, kembali pada jati diri ilmu pengetahuan yang ada untuk diperdebatkan serta jati diri dari filsafat yang ada untuk dipertanyakan.

Foucault adalah seorang kritikus pengetahuan sekaligus kritikus sosial pada saat yang bersamaan. Dalam proses pencariannya yang sangat panjang mengenai sejarah pengetahuan, seorang Foucault dibantu oleh dua tokoh untuk merumuskan ide dan konsep besar sejarah penalaran menjadi sebuah ide yang kritis tentang kebenaran dan makna ke dalam konteks sosial dan budaya, mereka tersebut adalah Martin Heidegger dan Georges Canguilhem (Af, 2012). Melalui serangkaian pemikiran, dirinya berhasil menerapkan berbagai ide dan konsep yang dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat.

Pemikiran yang terkenal dari Foucault adalah kuasa atau pengetahuan. Foucault menyatakan dalam bukunya “*power/knowledge*”, bahwa *power* atau kekuasaan merupakan suatu mekanisme yang menciptakan rasionalitas hukum dan pengetahuan sebagai alat untuk menegakan kekuasaan yang lebih luas (Bahasoan & Kotarumalos, 2014). Kekuasaan dan pengetahuan mempunyai keterkaitan dan hubungan yang timbal balik. Kekuasaan dapat menjadi alat pembenaran bagi hukum dan pengetahuan. Begitupun sebaliknya, dengan menggunakan pengetahuan maka kekuasaan akan didapatkan.

Pengertian kekuasaan menurut Foucault berbeda dengan pengertian kekuasaan yang selama ini banyak dipahami oleh orang-orang banyak. Kekuasaan dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar dapat berperilaku dan berfikir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mempengaruhi. Kekuasaan cenderung bersifat memaksa dan terkadang mengandung kekerasan. Sedangkan Foucault memberikan cara pandang baru mengenai kekuasaan, dimana kekuasaan dipahami sebagai hubungan yang rasional, positif, produktif, dan diskurtif. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami sebagai suatu hubungan kepemilikan seperti

properti, pendapatan, atau hak istimewa yang dapat diperoleh sebagian kecil kelompok di masyarakat yang dapat terancam punah (Kamahi, 2017). Kekuasaan itu menyebar dalam hubungan-hubungan masyarakat, tidak terpusat pada satu orang atau lembaga (Adlin, 2016). Sehingga kekuasaan dapat dipandang secara positif.

Bagi Foucault, kekuasaan dipandang tidak ubahnya sesuatu yang melingkupi namun, menghasilkan sebuah pengetahuan, bahkan keduanya saling terkait satu sama lain (Adlin, 2016). Kekuasaan dan pengetahuan bagaikan dua sisi uang logam yang saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Sehingga setiap kekuasaan akan berhubungan dengan pembentukan suatu pengetahuan, dan pembentukan suatu pengetahuan dapat secara langsung membentuk hubungan kekuasaan.

Foucault banyak berbicara mengenai relasi-relasi yang terjadi di antara manusia dan bagaimana sebuah kuasa itu dipraktikkan dalam konteks kebudayaan dan komunikasi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kekuasaan itu dapat digunakan baik secara represif maupun dominatif dalam arti seseorang dapat menguasai orang lain, tetapi yang dimaksudkan oleh Foucault adalah kuasa dalam arti strategi dan relasi antarmanusia (Kebung, 2017). Kekuasaan dipraktikkan dalam masyarakat sebagai sebuah strategi untuk menanamkan pengaruh kepada orang lain.

Untuk memahami kuasa sebagai suatu relasi strategi orang dapat menemukan berbagai pokok pikiran. *Pertama*, kuasa secara esensial dapat muncul dari relasi-relasi yang terjadi antara berbagai kekuatan (*forces*) (Kebung, 2017). Sehingga dapat dikatakan bahwa kuasa itu mutlak dan bersifat a priori, yang artinya kuasa itu tidak bergantung kepada kesadaran manusia. Maka sangat jelas kuasa itu bukanlah milik perorangan atau kelompok yang dapat dibagi-bagikan.

Kedua, kuasa itu tidak terdapat di satu titik tetapi menyebar kemana-mana. Sehingga kuasa tidak bisa dilokalisasi. Kuasa akan ada di mana terdapat struktur dan relasi antar manusia ada. *Ketiga*, kuasa dilihat sebagai sebuah mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsi dalam suatu bidang tertentu (Kebung, 2017). Setiap relasi kuasa yang terjadi, maka terdapat satu strategi perjuangan. Strategi ini terjadi dalam sebagai bentuk kuasa dalam mempengaruhi orang lain.

Keempat, kuasa berkaitan erat dengan pengetahuan (Kebung, 2017). Dengan terjadinya praktek kuasa akibat relasi yang terjadi di antara manusia, maka pengetahuan dapat didefinisikan dan menemukan bentuknya. Bagi Foucault pengetahuan tidak muncul disebabkan oleh sebuah subjek yang mengetahui akan sesuatu pengetahuan. Namun, pengetahuan muncul sebagai akibat dari terjadinya relasi kuasa di antara manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tidak akan ada tanpa adanya kuasa, dan begitupun sebaliknya kuasa tidak akan ada tanpa pengetahuan.

Kelima, kuasa biasanya muncul dari bawah dan secara esensial tidak represif (Kebung, 2017). Esensi dari sebuah kuasa tidaklah bersifat dominasi, di mana seseorang dapat memiliki kuasa terhadap orang lain. Kuasa bekerja melalui regulasi dan normalisasi terhadap sesuatu yang terjadi di antara relasi manusia. *Keenam*, di mana ada kuasa, selalu ada resistensi (Kebung, 2017). Setiap resistensi yang terjadi di masyarakat dapat ditanggapi secara langsung melalui sebuah tindakan. Tindakan-tindakan yang terjadi akibat dari resistensi harus dilaksanakan dalam keadaan bebas dan saling menerima.

Dalam tatanan masyarakat modern, semua tempat di mana berlangsungnya sebuah kekuasaan, maka tempat tersebut juga menjadi tempat pengetahuan. Semua pengetahuan memberikan jaminan bekerjanya sebuah kekuasaan. Kekuasaan disusun dan diwujudkan dalam sebuah pengetahuan dan wacana tertentu (Bahasoan & Kotarumalos, 2014). Wacana yang timbul akan mengasilkan suatu kebenaran dan pengetahuan, yang nantinya menimbulkan sebuah kuasa.

Kekuasaan akan memproduksi kebenarannya sendiri, dan mulai menerapkannya kepada orang lain untuk mengikuti kebenaran tersebut. Sehingga kekuasaan akan selalu menghasilkan rezim kebenaran yang disebarluaskan melalui sebuah wacana yang diproduksi dan dibentuk oleh kekuasaan yang sedang berlangsung. Melalui berbagai strategi yang dilakukan dalam proses relasi kuasa, maka rezim kebenaran akan terbentuk sebagai sebuah regulasi dan normalisasi terhadap sesuatu yang sedang terjadi.

Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai sesuatu yang melekat pada kehendak untuk mengetahui (Bahasoan & Kotarumalos, 2014). Melalui sebuah wacana, kehendak manusia untuk mengetahui sesuatu tersusun dalam sebuah pengetahuan. Kehendak untuk mengetahui

tersebut dapat menjadi proses dominasi terhadap objek-objek dan manusia lain. Sehingga pengetahuan merupakan sebuah cara untuk melakukan kekuasaan terhadap objek tertentu.

Foucault mempercayai jika suatu kekuasaan ingin bekerja maka dibutuhkan adanya suatu "rezim wacana" yang terdapat di dalam setiap kebudayaan dan masyarakat. Dalam rezim wacana terdapat permainan kebenaran, yang di mana dibalik setiap ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang mengandung sifat ingin menguasai. Kebenaran tersebut menyebar, yang artinya kebenaran tidaklah bergantung kepada satu subjek saja. Tetapi kebenaran ada dan menyebar pada setiap subjek. Kebenaran ada untuk menjelaskan kejadian pada satu zaman tertentu, sehingga kebenaran pada zaman yang satu tidak akan berfungsi pada zaman yang lain.

Rezim wacana memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap ranah intelektual atau pengetahuan. Melalui wacana yang dibentuk, maka dapat membentuk sebuah kebenaran terhadap pengetahuan dan diyakini oleh semua pihak. Rezim kebenaran dapat disamakan dengan kekuasaan, dimana melalui kekuasaan tersebut, wacana dapat mempunyai legitimasi di mana dapat menentukan sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Sehingga akan memunculkan sebuah regulasi dan normalisasi terhadap sebuah tindakan agar dianggap sebagai sesuatu yang normal.

Kekuasaan beroperasi dalam bentuk yang positif dan tidak berwujud, sehingga bagaimana bekerjanya suatu kekuasaan tidak dapat disadari oleh manusia dan efeknya dapat terlihat melalui bentuk pengetahuan dan wacana. Definisi-definisi ilmiah secara jelas juga menunjukkan sebagai salah satu efek dari beroperasinya sebuah kekuasaan dalam bentuk rezim wacana (Kamahi, 2017). Melalui definisi-definisi yang dibuat, berbagai disiplin ilmu memiliki pengetahuan dalam mempraktekan pengetahuan tersebut terhadap individu-individu di masyarakat.

Rezim wacana bersandar pada definisi ilmiah yang dibuat untuk menggambarkan suatu pengetahuan di masa tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap masa memiliki cirinya tersendiri dan memiliki kebenarannya sendiri. Dari masa ke masa akan terjadi pergeseran formasi wacana sesuai dengan relasi kuasa yang terjadi di masa tersebut.

Tujuan dari pemikiran Foucault mengenai kuasa atau pengetahuan adalah agar individu dapat berkembang secara mandiri dan menemukan bentuknya sendiri yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ketika seorang individu mampu mengatur dirinya sendiri dengan baik dan benar, maka individu tersebut juga dapat mengatur orang lain dengan baik dan benar pula. Sehingga kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh sekelompok orang atau negara, tetapi kekuasaan ada di mana-mana dan dapat berada pada siapa saja melalui relasi yang terjadi di antara manusia.

Foucault ingin menunjukkan bahwa kita sebagai individu merupakan sebagai bagian dari mekanisme kekuasaan. Sehingga individu harus sadar akan posisi dirinya dalam relasi kuasa yang terjadi. Melalui kesadaran tersebut akan tercipta suatu keinginan untuk melakukan kekuasaan dengan cara yang baik dan benar. Namun dalam kenyataannya masih banyak lagi individu-individu di masyarakat yang belum menyadari perannya dalam mekanisme kekuasaan.

Walaupun pemikiran Foucault banyak diakui dan dipraktekan oleh banyak orang. Namun bukan tidak mungkin pemikiran-pemikirannya memiliki pertentangan dengan pemikiran dari orang lain. Akan tetapi, mempelajari konsep kekuasaan dan pengetahuan dari pemikiran Foucault bukanlah sesuatu yang sia-sia. Sumbangan pemikiran Foucault dapat dimanfaatkan di berbagai bidang sosial di masyarakat.

b. Pemikiran Francis Bacon: *Knowledge is Power*

Bacon adalah seorang filsuf yang lahir dalam masa kegelapan di Eropa. Pada masa ini, gereja memiliki kekuatan mengikat atas setiap tingkah laku manusia, termasuk dalam kegiatan berpikir sehingga membatasi jati diri dan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dalam masa ini ilmu pengetahuan dianggap sebagai jalan menuju neraka. Siapa pun orang yang melawan kehendak gereja dianggap bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Pada situasi ini, Bacon menjadi saksi bahwa masyarakat Eropa tengah berada dalam titik terendahnya yang dimana masyarakat memiliki kualitas yang rendah, sehingga tidak setiap orang dapat menyentuh kitab injil yang suci (Fengren, 2000).

Dalam kondisi yang sama, Bacon pun menjadi saksi atas kekuasaan gereja yang menguat dalam setiap harinya. Hal ini, disebabkan oleh adanya bantuan dana yang cukup besar yang diberikan oleh kerajaan. Sehingga menyebabkan hegemoni agama semakin kuat, dalam berbagai aspek, dimulai dari publik religius hingga sains sekalipun tidak luput dari ketetapan-ketetapan gereja.

Latar belakang inilah yang membuat Bacon memiliki pemikiran berbeda dengan pemikir sebelumnya. Bacon yang memiliki keresahan dengan kehidupan masyarakat berpandangan bahwa teologi harus dipisahkan dari filsafat. Menurut Bacon, filsafat dan teologi adalah dua hal berbeda yang tidak dapat dicampurkan antara satu dengan yang lain. urusan teologi hanya dapat diketahui oleh wahyu. Sedangkan, filsafat hanya pada akal semata. Karenanya, Bacon termasuk dalam pemikir yang pendukung kebenaran ganda, yaitu akal dan wahyu. Salah satu buah pemikiran Bacon yang cukup dikenal hingga saat ini adalah *knowledge is power*.

Francis Bacon memulai diskursus pengetahuan dan kekuasaan ini sejak abad ke-17. Hal ini diyakini dengan sebuah keyakinan bahwasannya suatu saat setiap persoalan manusia dapat diselesaikan melalui ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini disampaikan oleh Bacon, tepat setelah Eropa terlepas dari masa kegelapan dan mengambil alih teknologi yang dimiliki oleh bangsa Islam di Cordoba. Pemikiran empirisme memberikan dominasi pada ide rasionalitas yang membangun kekuatan. Dengan kata lain, wacana yang akan memberikan kekuasaan kepada manusia baik untuk mensejahterakan ataupun menindas. Wacana empirisme terhadap kekuatan membuat superioritas pengetahuan, terhadap aspek lainnya. Stigma awal pandangan ini adalah bahwasannya pengetahuan akan membentuk peradaban manusia begitu juga kekuatan yang dimiliki pula yang akan membentuk peradaban itu sendiri.

Pemikiran Bacon yang yang dikenal dengan *knowledge is power* atau pengetahuan adalah kekuasaan yang didasarkan pada pengalaman. Hal ini disampaikan Bacon sebagai kritik bahwa ilmuwan di zamannya, berupaya untuk memanipulasi dan mengontrol alam menurut kehendaknya. Alam tidak didekati secara natural namun, didekati dengan kehendak manusia. Dari keadaan ini, Bacon menarik kesimpulan bahwa manusia terlalu berupaya untuk memaksakan keteraturan yang dimiliki alam, padahal keteraturan tersebut mungkin saja tidak nyata. Berkaca akan hal ini, Bacon menelurkan sebuah pemikiran baru dengan metode deduksi yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh Aristoteles.

Bacon berpandangan logika deduktif-silogistis yang disampaikan oleh Aristoteles tidak memiliki kesanggupan untuk menghasilkan penemuan-penemuan empiris. Bacon menyampaikan bahwa pemikiran tersebut hanya membantu mewujudkan konsekuensi deduktif dari apa yang sebenarnya telah diketahui. Agar pengetahuan tersebut dapat berkembang dan demi diperolehnya pengetahuan yang berguna, konkret dan praktis, metode deduktif harus diganti dengan metode induktif (Rapar, 1996). Metode ini dapat dimaknai sebagai prosedur yang berdasar dari peristiwa khusus atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Karena itu, metode induksi tidak dapat dilepaskan dari persoalan empirisme, yang merupakan suatu aliran yang menjadikan pengalaman dan panca indera sebagai sumber pengetahuan (Velazques, 1999). Karenanya disampaikan bahwa dalam segala bentuknya yang lebih khusus, induksi merupakan persoalan *generalisasi empiris*, yaitu ilmuwan berargumen bahwa karena sesuatu telah terbukti benar dalam sejumlah kasus yang telah diamati. Dalam hal ini ada kemungkinan yang diperoleh bersifat tidak pasti, namun kemungkinan besar dan seluruh prediksi rasional mengenai masa depan tergantung pada referensi tersebut. Pengambilan kesimpulan dengan metode ini, memberikan perbedaan yang nyata dengan pemikiran yang disampaikan oleh Aristoteles, di mana metode induktif tidak sekedar masalah empiris karena akan digunakan untuk menyimpulkan apa saja yang belum diamati.

Dalam kritiknya, Bacon menyampaikan bahwa ilmuwan tidak hanya perlu dengan mudah menerima ide-ide dari yang terdahulu. Para ilmuwan harus menyelidiki alam dengan pengamatan yang penuh kehatian-hatian yang disertai dengan percobaan-percobaan. Ilmuwan diharapkan mampu mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin tentang setiap fenomena yang dipelajari. Dalam hal ini dengan menggunakan eksperimen-eksperimen, manakala memungkinkan untuk menggeneralisir fakta-fakta tambahan. Bukti-bukti harus dikumpulkan, kemudian dipegang dan dianalisis dengan kehati-hatian dan menarik kesimpulan general melalui bukti-bukti tersebut. Hal ini disampaikan Bacon, untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam proses mendapatkan kebenaran.

Latar belakang pemikiran Bacon semakin nampak, karena Bacon berusaha mengkritisi pemikiran kaum rasionalis. Bacon berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh kaum rasionalis hanya mengutamakan akal budi. Sementara peran indera menjadi hal nomor dua bahkan dikesampingkan oleh kaum rasionalis dalam menemukan kebenaran. Cara kerja kaum rasionalis, kemudian disimpulkan sebagai cara kerja yang memaksakan obyek agar cocok dengan yang telah

dipikirkan (Keraf & Dua, 2001). Padahal, kesimpulan atau kebenaran tersebut telah dipikirkan sebelumnya dalam benak pada kaum rasionalis. Atas dasar pemikiran ini, Bacon dinyatakan sebagai peletak dasar lahirnya paham empirisme. Paham empirisme sendiri menekankan bahwa pengalaman dinyatakan sebagai sumber kebenaran yang paling dipercaya. Dasar pemikiran inilah yang kemudian diikuti oleh beberapa filsuf lainnya, seperti Barkeley, Locke ataupun Hume.

Walaupun pemikiran Bacon merupakan pengembangan dari pemikiran filsuf sebelumnya, hasil pemikiran Bacon dikenal dengan induksi Baconian. Sementara pemikiran sebelumnya dikenal dengan induksi tradisional. Dalam metode barunya ini, Bacon bertujuan untuk menjadikan manusia yang mampu menguasai kekuatan alam dengan perantaraan penemuan ilmiah, yang kemudian dituangkan dalam bukunya *Novum Organum* pada tahun 1620. Dalam bukunya disampaikan bahwa ilmu hanya dapat bermakna bila dapat diterapkan secara praktis, yang kemudian dikenal sebagai tandingan dari logika Aristoteles yang dibuat dengan latar belakang pemikiran deduktif.

Pemikiran Bacon tentang induktif-empiris memiliki tiga pokok utama, yaitu mengadakan penelitian ilmiah, dimana ilmuwan harus bebas dari segala bentuk pengandaian. Ilmuwan tidak boleh bias dengan hanya menggunakan data dan fakta yang hanya dimanfaatkan untuk membenarkan pemikiran yang telah ada sebelumnya, karena hanya akan menunjukkan bagaimana data-data yang relevan, sementara data-data dan fakta yang kurang relevan tidak akan dihiraukan. Dampaknya, kesimpulan yang diambil dari data-data dan fakta tersebut menjadi kurang relevan. *Kedua*, ilmuwan harus memasukan data dan fakta yang dianggap bertentangan antara satu dengan yang lain. *Ketiga*, setelah dilakukan pengamatan dan pengumpulan data, ilmuwan harus mengevaluasi, mengklasifikasikan, merumuskan dan menyimpulkan sesuai dengan kemampuannya. Dari hal ini lah ilmuwan dapat memanfaatkan berbagai konsep dan teori yang dipahami untuk mengolah data yang ada. Pada kesempatan ini pula, kebenaran ganda yang dipercayainya dapat dimanfaatkan yang di mana akal budi dan pengamatan inderawi akan menunjang untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan fakta dan data yang ada di lapangan (Keraf & Dua, 2001).

Dalam upaya menemukan kebenaran, Bacon menitikberatkannya pada dua hal, yaitu akal budi dan pemeriksaan. *Pertama*, rasio atau akal budi digunakan dengan mengacu pada pengamatan inderawi yang kemudian mengungkapkannya secara umum. *Kedua*, rasio yang berpangkal pada pengamatan digunakan untuk merumuskan ungkapan umum yang terdekat dan masih dalam jangkauan pengamatan itu sendiri, kemudian secara bertahap mengungkap yang lebih umum di luar pengamatan.

Dalam penerapan pemikiran Bacon diketahui bahwa terdapat tiga penemuan terbesar. *Pertama*, mesin yang menghasilkan kemenangan dan peran modernitas. Sumbangan pemikiran Bacon semakin nyata setelah ditemukannya mesin-mesin produksi yang mendukung hadirnya revolusi industri di Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Bacon tentang ilmu haruslah praktis dan bermanfaat dinyatakan melalui kemunculan mesin-mesin produksi.

Kedua, munculnya kompas yang memungkinkan manusia untuk mengarungi samudera. Kehadiran kompas sebagai buah bebasnya pemikiran yang telah lama terkungkung menjadi solusi nyata masalah kebutuhan masyarakat Eropa. Adanya pengetahuan tersebut memberikan kuasa bagi masyarakat Eropa untuk menemukan wilayah-wilayah lain yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan mereka. *Ketiga*, percetakan yang membantu percepatan penyebaran ilmu. Ketiga hasil penemuan ini membuka peradaban baru bagi masyarakat Eropa yang dikenal dengan *renaissance* (Mustansir & Munir, 2002).

Berkaca dengan hal ini, buah pemikiran Bacon telah nyata dalam berbagai bentuk penemuan di dunia. Tidak hanya pada masa *renaissance* bahkan hingga masa modern ini, dimana dalam setiap waktunya ditemukan penemuan-penemuan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Serta tujuannya untuk memudahkan kehidupan manusia, seperti kehadiran kendaraan, *gadget* atau perangkat terbaru hingga aplikasi dalam bidang lainnya. Pemikiran Bacon tentang *knowledge is power* yang tertuang dalam bukunya *Novum Organum* menyatakan bahwa untuk seorang tentokrat, kepintaran terhadap ilmu dan pengetahuan adalah sumber kekuasaan yang bersifat strategis. Dalam hal ini, tentokrat menjadikan ilmu pengetahuan sebagai unsur politik (kebijakan) untuk melakukan perubahan. Dalam realitasnya, pengetahuan menampakan diri dalam kekuasaan yang dapat dikatakan pengetahuan mewujudkan diri dalam teknologi dan teknologi tersebut adalah sarana untuk mengendalikannya, khususnya untuk mengendalikan sumber daya alam.

Bila dimasukkan dalam realitas saat ini, salah satu negara yang memegang prinsip *knowledge is power* adalah Amerika Serikat. Dimana, Amerika Serikat memiliki daulat sebagai negara adikuasa oleh negara-negara lainnya. Hal ini dinyatakan, karena Amerika Serikat memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan negara-negara lainnya di seluruh dunia. Amerika Serikat hadir dengan segala pengetahuannya, tentang informatika dan teknologi, sehingga mampu menguasai sebagian negara di dunia dan menjadikannya sebagai sekutu. Melalui ilmu yang dimilikinya, Amerika Serikat mampu membuat berbagai peralatan tempur canggih yang dijadikan sebagai senjata untuk dijual ataupun dijadikan sebagai alat ancaman bagi bangsa lain. Di sisi lain, Amerika Serikat mampu membangun perguruan-perguruan tinggi terbaik dan mengakomodasi seluruh masyarakatnya dengan pendidikan tersebut. Sehingga, generasi muda memiliki pendidikan mumpuni untuk kembali menguasai dunia dengan pengetahuan yang dimiliki.

Hal inilah yang membuat Amerika Serikat sanggup menjadi negara *superpower*. Pengertian *knowledge is power* dapat diumpamakan sebagai laut dan langit, di mana warna laut akan dipengaruhi oleh warna langit. Di saat langit cerah, maka warna air laut akan jernih dan berbeda di saat langit mendung. Seperti inilah kekuasaan dan ilmu pengetahuan, di mana dalam masa ke masa, kekuasaan akan membayangi orisinalitasnya dan ilmu pengetahuan itu akan berorientasi pada kekuasaan itu sendiri.

c. Ilmu Untuk Berkuasa: Hegemoni Bahasa

Kajian yang membuktikan *knowledge is power* dapat diimplikasikan dalam berbagai bidang, salah satunya kemampuan manusia untuk menguasai suatu bahasa untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan lainnya. Secara ringkas, kemampuan bahasa adalah salah satu bentuk hegemoni modern. Mengikuti latar belakang penulis yang berkulat dalam bidang sejarah, setidaknya dengan memiliki kemampuan bahasa lainnya selain bahasa ibu, maka kemampuan untuk berpikir yang penulis dapatkan dapat lebih membantu jika dibandingkan “membayangkan” penulis tidak memiliki kemampuan tersebut. Dengan pengalaman yang penulis alami tersebut, maka tidak mungkin bagi orang lain untuk mendapatkan pengalaman yang sama terlepas dari sifat hakikat manusia yang unik. Pendidikan tidak hanya untuk “memperkaya diri sendiri dengan kemampuan untuk berpikir”, terdapat pula bentuk hegemoni (*power*) atau kuasa yang mengatur tentang kebenaran yang ada di dalam ilmu pengetahuan.

Mengambil batas waktu sejak datangnya kapal dagang VOC di Nusantara pada tahun 1598 hingga pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, setidaknya terdapat Belanda, Prancis, dan Inggris serta Jepang yang membuat sejarahnya di Indonesia. Tentu saja sejarah yang mereka tuliskan diwujudkan dengan bahasa mereka sendiri dan tidak semua individu mampu untuk memahami bahasa dari sejarah-sejarah yang mereka ciptakan selama di Indonesia.

Keterbatasan kemampuan bahasa yang disebutkan sebelumnya dapat menghambat seorang individu untuk mempelajari mengenai sejarah bangsanya sendiri. Dengan mempelajari sejarah sendiri merupakan wadah yang penting untuk menanamkan jiwa-jiwa maupun nilai tentang nasionalisme bangsa maupun perjuangan bangsa Indonesia (Alfian, 2011). Menghadapi perkembangan teknologi yang kian maju yang dibuktikan dengan adanya Era *Society 5.0*, maka sejarah telah mampu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan maupun konsep humanisme. Maka dari itulah, untuk dapat mewujudkan Era *Society 5.0* yang menggantikan Revolusi Industri 4.0, manusia Indonesia diharuskan terlebih dahulu mampu untuk mempelajari maupun memahami sejarah dari bangsa sendiri (Basri & Hastuti, 2020). Maka dapat diketahui dengan jelas bagaimana dampaknya bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa besar jika tidak mempelajari sejarahnya sendiri.

Kembali pada bagian sebelumnya tentang penguasaan bahasa. Sebagai bahasa *universal*, Bahasa Inggris merupakan bagian dari hegemoni (Shannon, 1995). Seperti pada contoh kasus Amerika Serikat yang dapat menguasai dunia dengan pengetahuan yang dimilikinya, begitu pula dengan kemampuan Bahasa Inggris.

Praktik kolonialisme di Nusantara meninggalkan berbagai peristiwa yang diwujudkan oleh berbagai tulisan-tulisan, misalnya adalah saat Belanda melakukan praktik kolonialismenya di Hindia-Belanda yang tentu saja dituliskan dalam Bahasa Belanda. Selanjutnya, untuk memahami peristiwa yang Belanda lakukan di Hindia-Belanda yang diwujudkan dalam tulisan tadi, disinilah hegemoni

sebuah bahasa mulai terjadi. Tulisan berbahasa Belanda tersebut (yang saat ini sudah berubah fungsinya menjadi sumber primer sejarah) diterjemahkan menjadi Bahasa Inggris untuk memenuhi tuntutan bahasa *universal*. Manusia Indonesia sebagai tuan rumah di mana peristiwa tersebut berlangsung “dipaksa” untuk mempelajari Bahasa Inggris agar mengerti mengenai perjuangan bangsanya sendiri. Bagi mereka yang tidak menguasai Bahasa Inggris, tentu saja mereka tidak mampu untuk memahami suatu peristiwa sejarah dengan baik. Maka dari sinilah terlihat dengan jelas bagaimana kemampuan bahasa asing khususnya Bahasa Inggris berkuasa dalam pendidikan, dalam contoh ini adalah mempelajari sejarah. Tidak terbatas pada bidang keilmuan sejarah, hegemoni bahasa juga berlaku untuk ilmu lainnya, khususnya untuk mengetahui sumber informasi yang jauh lebih dan relevan. Lebih lanjut, masih tentang penguasaan bahasa tidak lepas dari pengucapan sebuah bahasa atau aksentuasi penuturnya. Setiap individu dikarenakan tidak memiliki cukup kuasa, harus memiliki dan menyesuaikan aksentuasi berbicara yang dimilikinya dengan aksentuasi yang dianggap “baik”. Salah satu contohnya adalah Bahasa Inggris yang baik adalah aksentuasi yang mengacu pada pengucapan ala Amerika atau Inggris yang dianggap sebagai aksentuasi standar penutur Bahasa Inggris (Orelus, 2020).

Sebagai alat yang digunakan untuk bersosialisasi sehari-hari, bahasa tidaklah bisa dilepaskan dari kehidupan. Hegemoni bahasa tidak hanya sebatas pada bidang pendidikan, namun pula pada penggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia, terkhusus pada bahasa-bahasa daerah nusantara yang memiliki tingkatan atau struktur bahasa. Kasus dari hegemoni bahasa dalam bahasa daerah dapat dilihat dari tatanan struktur Bahasa Jawa yang memiliki tingkatannya tersendiri (*speech of level*) tergantung kepada dan dari siapa bahasa tersebut dituturkan. Terdapat tingkatan penuturan yang terdiri dari *ngoko lugu*, *ngoko andhap*, *antya basa*, *basa antya*, *wredha krama*, *mudha krama*, *kramantara*, *madya ngoko*, *madya krama*, *madyantara*, *krama inggil*, dan *krama desa* bahkan terdapat tingkatan bahasa tersendiri bagi kalangan keraton Jawa yang disebut *kedhaton* dan *bagongan* (Santoso, 2013). Secara singkat, kepada mereka yang lebih tua atau mereka yang dihormati maka tingkatan bahasa yang diucapkan akan semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya.

Tidak hanya dalam penuturan Bahasa Jawa, terdapat pula Bahasa Jepang yang dalam penuturannya memiliki kaidah khusus dengan kurang lebih sama dengan Bahasa Jawa. Tingkatan penuturan Bahasa Jepang dapat dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah *futsu* atau bentuk biasa, lalu yang kedua adalah *teinei* sebagai bentuk sopan, dan terakhir adalah *keigo* sebagai bentuk penuturan hormat. Hampir sama dengan penuturan dalam Bahasa Jawa, lebih khusus lagi tingkatan *keigo* dalam penuturan Bahasa Jepang dimaksudkan untuk menghaluskan bahasa yang dituturkan oleh orang pertama (yang berbicara atau yang menulis), lalu untuk menghormati orang kedua (yang mendengarkan atau yang membaca), dan juga orang ketiga (yang dibicarakan) (Santoso, 2013).

Selain kedua bahasa yang disebutkan sebelumnya, tingkatan penuturan juga terdapat dalam Bahasa Korea yang memiliki enam (sebagian menyebutkan tujuh) tingkatan penuturan (Strauss & Eun, 2005). Masih sama dengan fungsi tingkatan penuturan dari kedua bahasa yang disebutkan sebelumnya, tingkatan penuturan ini dimaksudkan untuk menghormati mereka yang lebih tua daripada yang menuturkan.

Melalui contoh kasus ketiga bahasa tersebut, terdapat kesamaan mengenai fungsi dari *speech of level* masing-masing bahasa, yaitu untuk menghormati mereka yang secara usia lebih dan atau menghormati lawan bicaranya. Terlihat dengan baik bagaimana relasi kekuasaan ala pemaparan Foucault maupun Bacon dapat terlihat, yakni semakin bertingkat bahasa yang digunakan untuk seseorang maka akan semakin tinggi pula kekuasaan yang dirinya miliki. Mengikuti pernyataan yang sama, untuk menunjukkan kekuasaan terhadap dirinya sendiri terhadap seseorang maupun sekelompok orang, maka individu tersebut akan menggunakan tingkatan penuturan “yang merendahkan” lawan bicaranya, seperti menggunakan *ngoko lugu* dalam Bahasa Jawa maupun menggunakan ragam *futsu* dalam Bahasa Jepang, yang keduanya baik *ngoko lugu* maupun *futsu* sama-sama ditujukan bagi orang biasa. Tingkatan penuturan (*speech of level*) tidak sebatas sebagai menghormati mereka sebagai lawan bicara, relasi kuasa dalam menuturkan sebuah kosa kata bahasa di masyarakat juga sebagai bentuk pembedaan komunitas masyarakat (Hwang, 1990), khususnya bagi mereka yang memiliki kuasa maupun mereka yang dianggap memiliki kuasa lebih rendah atau dianggap tidak memiliki kuasa apapun. Kekuasaan terbentuk dalam sesuatu yang tidak berwujud, begitu pula dengan kuasa dalam tingkatan penuturan bahasa (*speech of level*) yang disebutkan pada bagian ini. Sebut saja bagaimana individu manusia berbicara dengan “atasannya”

atau bagaimana seorang “atasan” berbicara kepada yang dianggap “bawahannya”, terlihat dengan jelas bagaimana sebuah kuasa dapat dilihat dari cara mereka berbicara.

Terakhir, penguasaan bahasa tidak dapat dimiliki oleh setiap orang, dikarenakan kemampuan setiap individu manusia yang tidak sama. Bahasa asing, khususnya Inggris merupakan hegemoni dalam dunia pendidikan (serta berbagai bidang lainnya), dengan mempelajari Bahasa Inggris maupun Bahasa asing lainnya, maka kemampuan bahasa dapat mengantarkan individu manusia untuk mendapatkan ragam informasi lebih banyak yang dapat menambah kemampuan dalam berpikir. Salah satu pemikiran dari Foucault adalah keberadaan dari kuasa yang mendatangkan pengetahuan dan *vice versa* yang juga didukung oleh Bacon dengan pemikiran *knowledge is power*. Maka, mendapatkan sebuah pengetahuan yang diraih dengan program pendidikan diperlukan sebuah kuasa, dalam hal ini yang dimaksud dengan kuasa adalah kemampuan bahasa yang mumpuni dan hal ini juga berlaku sebaliknya, untuk mendapatkan kuasa maka diperlukan pengetahuan. Ilmu memang berkuasa dan mendatangkan kekuasaan, dan untuk meraih ilmu juga diperlukan sebuah kuasa.

4. Simpulan dan Saran

Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai sesuatu yang melekat pada kehendak untuk mengetahui. Pengetahuan merupakan sebuah cara untuk melakukan kekuasaan terhadap objek tertentu. Foucault mempercayai jika suatu kekuasaan ingin bekerja maka dibutuhkan adanya suatu “rezim wacana” yang terdapat di dalam setiap kebudayaan dan masyarakat. Dalam rezim wacana terdapat permainan kebenaran, di mana dibalik setiap ucapan yang dikeluarkan oleh seseorang mengandung sifat ingin menguasai. Kebenaran tersebut menyebar, yang artinya kebenaran tidaklah bergantung kepada satu subjek saja. Tetapi, kebenaran ada dan menyebar pada setiap subjek. Kebenaran ada untuk menjelaskan kejadian pada satu zaman tertentu, sehingga kebenaran pada zaman yang satu tidak akan berfungsi pada zaman yang lain. Senada namun berbeda, Bacon juga memiliki pemikiran mengenai kekuasaan. Pemikiran Bacon yang dikenal dengan *knowledge is power* atau pengetahuan adalah kekuasaan yang didasarkan pada pengalaman. Hal ini disampaikan Bacon sebagai kritik bahwa ilmuwan di zamannya, berupaya untuk memanipulasi dan mengontrol alam menurut kehendaknya. Alam tidak didekati secara natural namun, didekati dengan kehendak manusia. Dari keadaan ini, Bacon menarik kesimpulan bahwa manusia terlalu berupaya untuk memaksakan keteraturan yang dimiliki alam, padahal keteraturan tersebut mungkin saja tidak nyata.

Oleh karena itu, keduanya memiliki pandangan mengenai kekuasaan dari sudut pandangnya masing-masing. Pandangan tersebut tentu tidak terlepas dari latar belakang keluarga dan para gurunya. Untuk itu, pembahasan mengenai keduanya ini menjadi menarik jika dilihat secara utuh. Foucault berbicara mengenai kekuasaan, sedangkan Bacon berbicara mengenai kekuasaan dapat diraih dengan pengetahuan. Hasil pemikiran keduanya dapat dilihat dalam kehidupan nyata hingga saat ini, yaitu Amerika Serikat yang mampu menjadi *superpower* dikarenakan banyaknya informasi yang mereka dapatkan dan hegemoni dari bahasa yang menunjukkan relasi kekuasaan.

5. Daftar Pustaka

- Adlin, A. 2016. Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia. *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 13-26.
- Af, A. K. 2012. Konsep Kekuasaan Michel Foucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, 131-149.
- Alfian, M. 2011. Pendidikan Sejarah dan Permasalahan Yang Dihadapi. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol III, 2.
- Bahasoan, A., & Kotarumalos, A. F. 2014. Praktek Relasi Wacana dan Kuasa Foucaultian dalam Realitas Multi Profesi di Indonesia. *Populis*, Vol. 8, No.1, 13-22.
- Basri, I., & Hastuti, H. 2020. Bagaimana Sejarah Seharusnya Diajarkan? *Jurnal Kronologi*, 2(4), 140–148.

- Ferngren, G. B. 2000. *The History of Science and Religion in Western Tradition- An Encyclopedia*. New York: Garland Publishing, Inc.
- Hwang, J.-R. 1990. 'Deference' versus 'politeness' in Korean speech. *International Journal of the Sociology of Language*, 1990(82). doi: 10.1515/ijsl.1990.82.41.
- Kamahi, U. 2017. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. III, No. 1, 117-133.
- Kebung, K. 2017. Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Kontek 'Kekuasaan' di Indonesia. *MELINTAS*, 33.1, 34-51.
- Keraf, A. S., & Dua, M. 2001. *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustansir, R., & Munir, M. 2002. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Orelus, P. W. 2020. Other People's English Accents Matter: Challenging Standard English Accent Hegemony. *Excellence in Education Journal*, 9(1), 120–148.
- Rapar, J. H. 1996. *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Santoso, T. 2013. Tingkatan Bahasa Dalam Bahasa Jepang dan Undak-Usuk Bahasa Jawa (Kajian Linguistik Kontrasif). *Japanese Literature (2)*, 1,
- Shannon, S. M. 1995. The hegemony of English: A case study of one bilingual classroom as a site of resistance. *Linguistics and Education*. doi: 10.1016/0898-5898(95)90022-5.
- Strauss, S., & Eun, J. O. 2005. Indexicality and honorific speech level choice in Korean. *In Linguistics*. doi:10.1515/ling.2005.43.3.611
- Suriasumantri, J. 2009. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Velazques, M. 1999. *Philosophy, A Text With Readings*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Zubaedi. 2007. *Filsafat Barat; Dari Logika Baru Rene Descartes Hingga Revolusi Sains*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media.